



Judul : Kabar dari lokasi bencana semakin menggembirakan
Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 6

Kabar Dari Lokasi Bencana Semakin Menggembirakan

Proses pemulihan lokasi bencana di Sumatera semakin menggembirakan. Sejumlah wilayah sudah bangkit. Akses darat yang sempat putus perlahan tersambung, layanan dasar beroperasi optimal, dan aktivitas warga mulai pulih.

Di Aceh, proses pemulihan infrastruktur berjalan cepat. Sebanyak 11 jembatan bailey telah rampung 100 persen sehingga bisa membuka kembali jalur vital yang sebelumnya lumpuh. Pembangunan berjalan cepat berkat dukungan personel Kodam Iskandar

Muda (IM). Lima jembatan berada di Kabupaten Bireuen. Di antaranya Jembatan Teupin Mane yang menghubungkan jalur Bireuen-Bener Meriah-Takengon; Jembatan Teupin Reudeup menuju Bireuen-Lhokseumawe; Jembatan

Matang Bangka yang menjadi akses utama Kampung Matang Bangka-Matang Teungoh; dan Jembatan Katablang yang menghubungkan jalur Bireuen-Lhokseumawe.

Di Kabupaten Bener Meriah, ada tiga jembatan yang sudah rampung

dan bisa dilalui kendaraan yakni Weh Pase, Timang Gajah, dan Jamur Ujung. Di luar itu, pembangunan 15 jembatan tambahan terus dikebut. Antara

1. Di Aceh Utara, akses kembali terbuka lewat Jembatan Panton Nisam, Bukit Dara Bhaktya, dan Beutong Ateuh yang menghubungkan Takengon-Nagan Raya.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6



Pulihkan Aceh, Pemerintah Beri Dana TKD Full

Kabar Dari Lokasi Bencana

... DARI HALAMAN 1

progres 65 persen.

Untuk mempercepat pemulihan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavianta menggelar rapat dengan Wakil Gubernur Aceh dan seluruh kepala daerah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Kepada para kepala daerah, Mendagri meminta agar tidak takut melakukan inisiatif pemulihan. Pemerintah akan mendukung anggaran pemulihan secara optimal.

“Untuk yang ringan, daerah tangani sendiri. Jangan takut tidak ada anggaran. Khusus Aceh, TKD (Transfer Kas Daerah) yang sebelumnya dipangkas akan dikembalikan seperti semula,” ucap Mendagri, dalam rapat tersebut.

Mendagri menegaskan, kebijakan pengembalian TKD telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan di seluruh lini.

Di tambahan, rapat ini menjadi konsolidasi awal Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. Mendagri, yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas, langsung membuat daftar periksa untuk mengukur tingkat kenormalan di setiap

daerah. “Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan. Pemulihan itu artinya menuju normal,” ujarnya.

Indikator normalisasi mencakup berfungsiya pemerintahan daerah, layanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial, hingga ketersediaan listrik, air bersih, dan internet.

Dari pemerintah awal, Aceh sebagai daerah terdampak paling berat membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Aceh dijadikan pusat posko nasional untuk wilayah Sumatera bagian utara.

“Ini (Aceh) harus diseriusin betul, karena agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan yang lain, karena kita prihatin juga,” ujar Tito.

Mendagri menegaskan, masa krisis adalah ujian sejati bagi para kepala daerah. “Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” tegasnya.

Dia juga meminta seluruh kepala daerah menyerahkan data kerusakan secara rinci, mencakup fasilitas kesehatan, sekolah, pasar, rumah ibadah, hingga jalan dan jembatan. Data tersebut akan dibawa ke rapat lintas kementerian untuk menentukan kebutuhan anggaran dan langkah tindak lanjut. “Makin detail (datanya) makin bagus,” ujarnya.

Dia juga memberi kewenangan penuh kepada bupati dan wali kota untuk memanfaatkan sisa material kayu untuk pembangunan hunian sementara maupun

perbaikan fasilitas umum.

Khusus Aceh Tamiang, Mendagri memberikan perhatian lebih. Minggu (11/1/2026), Mendagri menyerahkan 456 gerobak sorong dan 1.300 dus makanan instan. Dia menegaskan, pembersihan lumpur pascabencana di Aceh Tamiang tidak boleh berlarut.

“Bantuan ini untuk mempercepat pembersihan material lumpur sisa banjir kemarin,” ujarnya. Dia menargetkan kawasan permukiman harus bersih sebelum Ramadhan 1447 H.

Dalam kunjungan itu, Mendagri melihat geliat ekonomi masyarakat mulai tampak. “Ekonomi sudah mulai kelihatan. Warung, restoran, kemudian pasar sudah mulai buka. SPBU sudah buka semua,” imbuhnya.

Di Sumut, akses untuk desa terisolir juga terus dibuka. Sebelumnya beberapa desa di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara terisolir karena jalan tertutup material longsor. Kini, jumlah desa terisolir terus berkurang.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mencontohkan, di Kecamatan Parmonangan, Tapanuli Utara, awalnya ada enam desa terisolir. Saat ini tersisa tiga. Bantuan logistik terus disalurkan menggunakan cara alternatif, mulai dari berjalan kaki, kendaraan roda dua jenis trail, hingga

helikopter untuk menjangkau lokasi paling sulit.

Di Sumbar, pembangunan hunian sementara (hunian) terus dikebut. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade bertemu Kepala BP BUMN/COO Dananstra Dony Oskaria untuk mempercepat pembangunan ratusan unit hunian.

“Ini adalah bentuk kepedulian nyata agar masyarakat terdampak bisa segera menempati hunian yang layak dan aman,” ujar Andre, Minggu (11/1/2026).

Andre menyebut, hunian yang dibangun memiliki kualitas setara dengan yang telah berdiri di Aceh Tamiang. Politisi Partai Gerindra ini berharap dukungan Dananstra dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi di Sumatera Barat. “Ini adalah komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera menuntaskan semua masalah pascabencana,” katanya.

Dony menegaskan komitmen Dananstra untuk mendukung pemulihan di Sumatera, termasuk Sumbar. “Kami ingin memastikan Hunta yang dibangun memiliki kualitas baik dan dapat segera dimanfaatkan oleh warga,” ujarnya.

Untuk tahap awal, pembangunan hunian dilakukan di tiga kabupaten yakni Tanah Datar, Agam, dan Padang Pariaman. Dony memastikan, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar proses pembangunan cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. ■ BYU